

**NASKAH URGENSI
KETENTUAN TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI
GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga daya beli pekerja/buruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan melalui pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah. Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk melindungi dan memberikan stimulus ekonomi bagi pekerja/buruh akibat dinamika ekonomi nasional.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 yang menjadi dasar pelaksanaan subsidi gaji/upah dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum, kondisi ketenagakerjaan, serta kebijakan penganggaran pemerintah terkini. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan agar pelaksanaan bantuan pemerintah tersebut lebih tepat sasaran dan memiliki kepastian hukum.

B. Urgensi

1. Menyesuaikan kebijakan subsidi gaji/upah dengan perkembangan hukum dan kondisi ketenagakerjaan terkini.
2. Menjaga dan memperkuat daya beli pekerja/buruh berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pemberian bantuan pemerintah.
4. Memperkuat aspek pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan subsidi gaji/upah.
5. Mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Tujuan

1. Menjadi landasan pengaturan pemberian bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji/upah agar tetap relevan dengan kondisi dan kebijakan terkini.
2. Menjamin pelaksanaan bantuan subsidi gaji/upah yang tepat sasaran.
3. Menyesuaikan pengaturan teknis bantuan subsidi gaji/upah dengan kebijakan penganggaran negara dan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan bantuan subsidi gaji/upah.

D. Analisis

Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat peran pemerintah dalam melindungi pekerja/buruh dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan subsidi gaji/upah merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pekerja/buruh serta menjaga keseimbangan sosial

dan ekonomi, sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kondisi perekonomian yang dinamis, pekerja/buruh dengan tingkat penghasilan tertentu mengalami penurunan daya beli akibat meningkatnya biaya hidup. Kebijakan pemberian bantuan subsidi gaji/upah menjadi instrumen penting untuk menjaga kemampuan pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi nasional.

E. Substansi/Materi Peraturan

Substansi pengaturan dalam pokok pikiran ini diarahkan pada penyempurnaan pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa pemberian bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh agar selaras dengan kondisi ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah terkini. Materi muatan pengaturan mencakup:

- a. penegasan tujuan subsidi gaji/upah, sebagai instrumen untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b. pengaturan kriteria dan persyaratan penerima bantuan, agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya;
- c. kejelasan kriteria penerima;
- d. besaran bantuan;
- e. mekanisme penyaluran;
- f. penguatan pengawasan melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

F. Jangkauan Arah Pengaturan

Pengaturan ini berbentuk perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang bersifat teknis dan operasional sebagai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah. Cakupan sasaran pengaturan meliputi pekerja/buruh sebagai penerima manfaat, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab kebijakan dan pelaksana program, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia data kepesertaan.

Manfaat pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran subsidi gaji/upah, menjaga daya beli pekerja/buruh, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.